

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2009 SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana Hukum**



OLEH

MARIA YUSVINA WUNU
2020110286

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**

ENDE

2024

LEMBAR PERSUTUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2009 SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

SKRIPSI


DI SUSUN OLEH

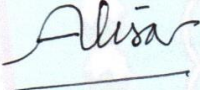
MARIA YUSVINA WUNU
2020110286

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Yohanes Pande, S.H.,M.H
NIDN : 0807127403


Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum
NIDN : 0828066802

MENGETAHUI:

Dekan
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores


Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701


Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBARAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2009 SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

SKRIPSI

MARIA YUSVINA WUNU
2020110286

Telah Dipertahankan di Depan Penguji

Pada Hari : Jumat

Tanggal : 9 Agustus 2024

Tim Panitia Penguji:

- | | |
|--|---|
| 1. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum (Ketua) | 1.....
 |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum (Sekretaris) | 2.....
 |
| 3. Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc (Anggota) | 3.....
 |
| 4. Yohanes Pande, S.H.,M.H (Anggota) | 4.....
 |
| 5. Maria A. Liza Quintarti, S.H.,M.Hum (Anggota) | 5.....
 |

Mengesahkan

Dekan
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores



Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701



Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Yusvina Wunu

Nim : 2020110286

Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Agustus 2024



Maria Yusvina Wunu

Nim : 2020110286

MOTTO

*“Apapun Nanti Hasilnya, Banggalah Terhadap Setiap Proses Yang Kamu Lalui,
Hargai Dirimu Yang Terus Berusaha Untuk Menjadi Lebih Baik”*

(Ovynd Wunu)

PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan lancar, dan skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tuaku : Bapak Florianus Bani Beo dan Mama Maria Imakulata Oka, merekalah yang dengan serba keterbatasannya telah bergelut dengan kehidupan untuk menghantar penulis kegerbang sebagaimana layaknya anak manusia.
2. Kepada Kakak dan Adikku : Yogand Meko, Roslin Wunu, Intan Wunu, Nona Wunu, Elgand Wunu dan Anisa Wunu tak dapat dilupakan penderitaan dan pengalaman hidup mereka yang dijadikan modal untuk berdoa dan berupaya memenuhi harapan untuk menjadikan penulis menjadi insan yang kiranya berguna bagi Agama, Nusa, Bangsa dan Negara.
3. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang telah membimbing, mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Kepada Keluarga Besar Tombe Mena yang sudah lama merindukan atas keberhasilan studi ini.
5. Kepada Teman-temanku : Ficky Fransiska, Maria Awunita Mono, Ocyk Jarut, Kakak Thynd Rue dan Adik Elin yang selama ini sudah membantu dan memberikan dukungan dalam melakukan penelitian dan mengerjakan skripsi bersama-sama.

6. Kepada teman-teman seperjuangan program studi Ilmu Hukum Universitas Flores Ende angkatan 2020 kelas sore yang selalu bersama-sama dalam suka maupun duka berjuang dalam penyusunan karya ilmiah.
7. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama ini, baik dalam material maupun moral demi meraih suksesnya studi ini.
8. Almamaterku tercinta Universitas Flores.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores Ende. Harapan peneliti, semoga dengan adanya laporan ini dapat membantu menambah pengetahuan dan pengalaman ilmu bagi setiap orang yang membacanya sehingga dapat memahami dan mengerti bagaimana “Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti mulai proses penelitian hingga pada tahap penyusunan laporan penelitian ini, kiranya Tuhan membalas semua jasa baik yang telah peneliti terima. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan dan motivasi serta saran-saran yang telah mendorong penulis sehingga dapat melangkah pada

penyempurnaan skripsi ini. Rasa terimakasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Willybrodus Lanamana, M.M.A Sebagai Rektor Universitas Flores.
2. Ibu Cristina Bagenda, S.H.,M.H, Sebagai Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora.
3. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum Sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora.
4. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum Sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan Dan Kepegawaian Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora.
5. Ibu Gratiana Sama, S.pd.,M.Hum Sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora.
6. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum Sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora.
7. Bapak Yohanes Pande, S.H.,M.H Sebagai Dosen Pembimbing I Yang Telah Memberikan Bimbingan Dalam Penyusunan Skripsi Ini.
8. Ibu Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum Sebagai Dosen Pembimbing II Yang Telah Memberikan Bimbingan Dalam Penyusunan Skripsi Ini.
9. Bapak Dan Ibu Dosen Serta Karyawan/I Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores Yang Dengan Caranya Masing-Masing

telah Memberikan Dukungan, Bantuan dan Motivasi Kepada Penulis
Selama Melakukan Studi di Universitas Flores.

10. Kepada Perpustakaan Universitas Flores Dan Seluruh Stafnya Yang
Pernah Penulis Kunjungi Yang Telah Memberikan Fasilitas, Tempat, dan
Waktu Bagi Penulis.

Ende, Agustus 2024

Peneliti

ABSTRAK

**Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 Sebagaimana Telah Dirubah Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah Disusun Oleh : Maria Yusvina Wunu, NIM :
2020110286**

Alasan peneliti memilih judul tentang : “penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” karena terjadi permasalahan dimana banyak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor tetapi mereka lalai untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang dimiliki sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor sesuai apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kota ende dan apa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Ende.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Ende masih kurang tegas sehingga masih banyak wajib yang lalai sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan memiliki banyak faktor yang menjadi penghambat atas penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Ende seperti : permasalahan ekonomi, kelalaian yang disebabkan oleh wajib pajak sendiri, transaksi alih kendaraan yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor dan belum melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor dan sengaja tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Kesimpulan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor belum melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dalam hal ini wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lalai dalam membayarkan pajak sehingga terjadi keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang dimiliki.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

Thesis Title: Law Enforcement Regarding Late Payments Of Motor Vehicle Tax Is Payments Reviewed From Law Number 28 Of 2009 As Amended By Law Number 1 Of 2022 Concerning Financial Relations Between The Central Government And Regional Governments Compiled By: Maria Yusvina Wunu, NIM: 2020110286

The reason the researcher chose the title: "law enforcement regarding late payment of motor vehicle tax in view of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Government" is because there are problems in which many people who own motor vehicles but they neglect to pay the tax on the motor vehicles they own, resulting in delays in paying motor vehicle taxes in accordance with what is mandated by Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments.

The formulation of the problem in this research is how to enforce the law regarding late payment of motor vehicle tax in Ende City and what are the inhibiting factors in law enforcement regarding late payment of motor vehicle tax in Ende City.

The results of the research show that law enforcement regarding late payment of motor vehicle tax in Ende City is still not strict enough so that there are still many obligators who are negligent, resulting in delays in paying motor vehicle tax and there are many factors that become obstacles to law enforcement against late payment of motor vehicle tax in the City. Ende such as: economic problems, negligence caused by taxpayers themselves, vehicle transfer transactions that are late in paying motor vehicle tax and have not transferred the name of the motor vehicle and deliberately do not pay motor vehicle tax. The conclusion is that motor vehicle taxpayers have not implemented the mandate of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments, in this case taxpayers who own motor vehicles are negligent in paying taxes, resulting in delays in paying the motor vehicle taxes they own.

Keywords: Law Enforcement, Motor Vehicle Tax

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Ruang Lingkup Masalah	14
1.4 Tujuan Penelitian	14
1.5 Manfaat Penelitian	15
1.6 Metode Penelitian	15
1.7 Lokasi Penelitian.....	19
1.8 Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Penegakan Hukum	20

2.2 Pengertian pajak.....	22
2.3 Pengelompokan Pajak	24
2.4 Kesadaran Membayar Pajak.....	25
2.5 Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2.6 Pajak Kendaraan Bermotor	27

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN

PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR29

3.1 Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	29
3.2 Upaya UPTD Penadapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ende Dalam Mengatasi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaran Bermotor	43

BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENEGAKAN HUKUM

TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK

KENDARAAN BERMOTOR46

4.1 Faktor Yang Menjadi Penghambat/Kendala Atas Penegakan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	48
--	----

BAB V PENUTUP.....53

5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN